

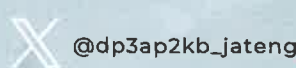
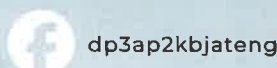
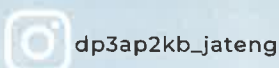


DINAS PEREMPUAN DAN ANAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

NGOPENI.  
NGLAKONI.  
Jateng

# PERJANJIAN KINERJA (PK) 2026

DINAS PEREMPUAN DAN ANAK  
PROVINSI JAWA TENGAH





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi  
Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St.M.K

Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kaml.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,


2026

Pihak Kedua,  
GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St.M.K

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH

  
Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 2.698.800.000,-	APBD
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 770.432.000,-	APBD & DAK-NF
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 328.408.000,-	APBD
4	Program Pemenuhan Hak Anak ( PHA )	Rp. 373.720.000,-	APBD
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 296.720.000,-	APBD & DAK-NF
6	Program Pengendalian penduduk	Rp. 160.000.000,-	APBD
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana ( KB )	Rp. 389.667.000,-	APBD
8	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera ( KS )	Rp. 177.353.000,-	APBD
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.16.341.824.000,-	APBD

Pihak Kedua,

GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St.M.K.

Semarang,

2026

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPARMANTO DWIADI, S.Sos, M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Ema Rachmawati, M.Hum

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa  
Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan  
Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana  
Provinsi Jawa Tengah

Pihak Pertama,  
Sekretaris Dinas

  
Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001

  
SUPARMANTO DWIADI, S.Sos, M.Si  
Pembina  
NIP. 19741119 200604 1 006

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Sekretariat

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	55%
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 16.341.824.000	APBD

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Jawa Tengah



Dra. EMA RASHMAWATI, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama,  
Sekretaris Dinas

SUPARMANTO DWIADI, S.Sos, M.Si  
Pembina  
NIP. 19780919 200604 2 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PIPIN PINTAWATI ARY PAMUNGKAS.,S.Kom., MM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUPARMANTO DWIADI, S.Sos, M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas

SUPARMANTO DWIADI, S.Sos, M.Si  
Pembina  
NIP. 19741119 200604 1 006

Pihak Pertama,  
Kasubag Umum dan Kepegawaian

PIPIN PINTAWATI A.P.,S.Kom, MM  
Pembina  
NIP. 19730310 199803 2 004

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>KEGIATAN</b>		
1	Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen
2	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	90 %
3	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	90 %
4	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	3 unit
5	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan
6	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit
	<b>SUB KEGIATAN</b>		

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
2	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
3	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang
4	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket
7	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
8	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
9	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	1 dokumen

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perundang-Undangan yang Disediakan	
10	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen
11	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
12	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit
13	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan
14	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan
15	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan
16	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 unit
17	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>KEGIATAN</b>		
1	Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen
2	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	90 %
3	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	90 %
4	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	3 unit
5	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan
6	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit
	<b>SUB KEGIATAN</b>		

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
2	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
3	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang
4	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket
7	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
8	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
9	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	1 dokumen

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perundang-Undangan yang Disediakan	
10	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen
11	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
12	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit
13	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan
14	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan
15	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan
16	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 unit
17	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
18	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
19	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit


Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 60.000.000	APBD
1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 40.000.000	APBD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 208.462.000	APBD
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 7.000.000	APBD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.325.510.000	APBD
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 596.190.000	APBD

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas

Pihak Pertama,  
Kasubag Umum dan Kepegawaian

  
SUPARMANTO DWIADI, S.Sos, M.Si  
Pembina  
NIP. 19741119 200604 1 006

  
PIPIN PINTAWATI ARY P., S.Kom., MM  
Pembina  
NIP. 19730310 199803 2 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADIATMA NUGRAHA, S.IP., M.Si

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUPARMANTO DWIADI, S.Sos, M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas

SUPARMANTO DWIADI, S.Sos, M.Si  
Pembina  
NIP. 19741119 200604 1 006

Pihak Pertama,  
Kasubag program

ADIATMA NUGRAHA, S.IP., M.Si.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19870709 201001 1 007

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Sub Bagian Program

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>KEGIATAN</b>		
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	50 %
	<b>SUB KEGIATAN</b>		
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
3	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data
4	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Sub Bagian Program

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>KEGIATAN</b>		
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	50 %
	<b>SUB KEGIATAN</b>		
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
3	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data
4	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 207.000.000	APBD

Semarang, 20 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Sekretaris



SUPARMANTO DWIADI, S.Sos, M.Si  
Pembina  
NIP. 19741119 200604 1 006

Pihak Pertama,  
Kasubag program



ADIATMA NUGRAHA, S.IP., M.Si  
Penata Tingkat I  
NIP. 19870709 201001 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Husna Listyati, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suparmanto Dwiadi, S.Sos, M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas

SUPARMANTO DWIADI, S.Sos, M.Si  
Pembina  
NIP. 19741119 200604 1 006

Pihak Pertama,  
Kasubag Keuangan

NURUL HUSNA LISTYATI, SE  
Penata Tingkat I  
NIP. 19720811 199703 2 006

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Sub Bagian Keuangan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>KEGIATAN</b>		
1	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen
2	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	90 %
	<b>SUB KEGIATAN</b>		
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 orang / bulan
2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
5	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Sub Bagian Keuangan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>KEGIATAN</b>		
1	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen
2	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	90 %
	<b>SUB KEGIATAN</b>		
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 orang / bulan
2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
5	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket

6	Terlaksananya Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat	Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Rapat	1 Laporan
---	--	-------	---	------------------	--------------

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 11.876.189.000	APBD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 392.921.000	APBD

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Sekretaris



SUPARMANTO DWIADI, S.Sos, M.Si  
Pembina  
NIP. 19741119 200604 1 006

Pihak Pertama,  
Kasubag Keuangan



NURUL HUSNA LISTYATI, SE  
Penata Tingkat I  
NIP. 19720811 199703 2 006



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MELATI DIAH PAMUNGKAS, S.E, M.M

Jabatan : Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi  
Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Jawa Tengah

Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama  
Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan  
Perlindungan Perempuan

Melati Diah Pamungkas, S.E, MM  
Penata Tingkat I  
NIP. 19850516 200901 2 010

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah Provinsi	12 %
1.1	Meningkatnya Kapasitas Perempuan di Bidang Ekonomi	Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	80 %
2	Meningkatnya jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai standar	Persentase UPTD PPA kabupaten/kota sesuai standar layanan	85 %
3	Meningkatnya komitmen Kabupaten/Kota dalam pembangunan ketahanan keluarga	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	20%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 2.698.800.000	APBD
2. Perlindungan Perempuan	Rp 634.392.000	APBD & DAK-NF
3. Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 312.808.000	APBD

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah



Dra. Ena Rachmawati, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

Melati Diah Pamungkas, S.E, MM  
Penata Tingkat I  
NIP. 19850516 200901 2 010



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asteria Dewi Rusrinawati, S.Psi, M.Psi

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Melati Diah Pamungkas, S.E, MM

Jabatan : Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan  
Perlindungan Perempuan

Melati Diah Pamungkas, S.E, MM  
Penata Tingkat I  
NIP. 19850516 200901 2 010

Pihak Pertama,  
Ketua Kelompok Kerja  
Perlindungan Perempuan

Asteria Dewi R, S.Psi, M.Psi  
Pembina  
NIP. 19720814 1999012 001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>KEGIATAN</b>		
1	Meningkatnya kab/kota yang mengimplementasikan rumah perlindungan perempuan di kecamatan	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan	25 %
2	Meningkatnya jumlah lembaga penyedia layanan di Kabupaten/Kota yang terstandarisasi	Jumlah lembaga penyedia layanan yang terstandarisasi	15 unit
	<b>SUB KEGIATAN</b>		
1	Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
2	Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	35 orang
3	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	5 kegiatan
4	terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	15 orang

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi		
5	terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen
6	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	5 lembaga

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 115.750.000	APBD
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp 518.642.000	APBD & DAK-NF

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Kesetaraan Gender  
dan Perlindungan Perempuan



Melati Diah Pamungkas, S.E, MM  
Penata Tingkat I  
NIP. 19850516 200901 2 010

Pihak Pertama,  
Ketua Kelompok Kerja  
Perlindungan Perempuan



Asteria Dewi R, S.Psi, M.Psi  
Pembina  
NIP. 19720814 1999012 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Isti Ilma Patriani, M.Psi.

Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Ema Rachmawati, M.Hum

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi  
Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Provinsi Jawa Tengah

Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 1 9660517 199008 2 001

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan  
Perlindungan Anak

ISTI ILMA PATRIANI, M.Psi.  
Pembina  
NIP. 19830816 200912 2 001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas lembaga Layanan Keluarga yang responsif gender dan hak anak di Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan keluarga yang terlatih	24 %
2.	Meningkatnya kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	61,5 (Angka)
3	Meningkatnya kualitas perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	79 (Angka)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 15.600.000	APBD
2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 373.720.000	APBD
3. Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 160.680.000	APBD & DAK NF

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah



Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

ISTI ILMA PATRIANI, M.Psi.  
Pembina  
NIP. 19830816 200912 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**  
**PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DA**  
**KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsi No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARDIAN AGIL WASKITO, S.Psi

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Pemenuhan Hak Anak Dinas  
Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Isti Ilma Patriani, M.Psi

Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan  
Perlindungan Anak

ISTI ILMA PATRIANI, M.Psi  
Pembina  
NIP. 19830816 200912 2 001

Pihak Pertama,  
Ketua Kelompok Kerja  
Pemenuhan Hak Anak

ARDIAN AGIL WASKITO, S.Psi  
Penata Tingkat I  
NIP. 19880730 201101 1 005

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>KEGIATAN</b>			
1	Meningkatnya predikat KLA kab/kota	Jumlah Kabupaten/Kota dengan predikat KLA minimal Madya	30 kab / kota
2	Meningkatnya jumlah lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak yang mendapat KIE Layanan Ramah Anak	Jumlah lembaga layanan pemenuhan hak anak yang mendapatkan KIE layanan ramah anak	35 lembaga
3	Meningkatnya ketersediaan Layanan Keluarga yang responsif gender dan hak anak	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	100%
<b>SUB KEGIATAN</b>			
1	Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 Orang
2	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan	20 lembaga

		Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
3	Terselenggaranya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	3 kegiatan
4	terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 dokumen
5	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan pendampingan	10 lembaga

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 15.600.000	APBD
2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 373.720.000	APBD

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pemenuhan Hak  
dan Perlindungan Anak



ISTI ILMA PATRIANI, M.Psi  
Pembina  
NIP. 19830816 200912 2 001

Pihak Pertama,  
Ketua Kelompok Kerja  
Pemenuhan Hak Anak



ARDIAN AGIL WASKITO, S.Psi  
Penata Tingkat I  
NIP. 19880730 201101 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAISA MUKTI SETYANI, S.Sos, M.si

Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi , Komunikasi  
Informasi dan Edukasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi  
Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Jawa Tengah

Dra. Ema Rachmawati, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Keluarga Berencana,  
Advokasi, Komunikasi, Informasi dan  
Edukasi

Faisa Mukti Setyani, S.Sos, M.si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710919 200312 2 004

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Bidang Keluarga Berencana,Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	(Jumlah peserta KB Aktif yang menggunakan kontrasepsi modern dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur)x 100	69,48 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 389.667.000	APBD

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Provinsi Jawa Tengah



Dra. Irma Rachmawati, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Keluarga Berencana  
Advokasi, Komunikasi, Informasi  
dan Edukasi

Faisa Mukti Setyani, S.Sos, M.si  
Pembina Tingkat.I  
NIP. 19710919 200312 2 004



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**  
**PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI GUSTIANISARI, SH,MH

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FAISA MUKTI SETYANI, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi , Komunikasi  
Informasi dan Edukasi Dinas Perempuan dan Anak Provinsi  
Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Keluarga Berencana,  
Advokasi, Komunikasi, Informasi  
dan Edukasi

Pihak Pertama,  
Ketua Kelompok Kerja Seksi  
Keluarga Berencana

Faisa Mukti Setyani S.Sos, M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19710919 200312 2 004

Dwi Gustianisari, SH,MH  
Pembina  
NIP. 19760828 199703 2 001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Seksi Keluarga Berencana Bidang Keluarga Berencana dan KIE

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sasaran Kegiatan</b>			
1.	Meningkatnya Akseptor KB MKJP	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	27.9 %
2.	Menurunnya jumlah PUS tidak terlayani menggunakan kontrasepsi modern	Unmetneed KB	9,25%
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>			
1.	Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	10 dok
2.	Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2 organisasi

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp 148.000.000	APBD
2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp 37.000.000	APBD

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Keluarga Berencana,  
Advokasi, Komunikasi Informasi  
dan Edukasi



Faisa Mukti Setyani, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19710919 200312 2 004

Pihak Pertama,  
Ketua Kelompok Kerja  
Keluarga Berencana



Dwi Gustianisari, SH, MH  
Pembina  
NIP. 19760828 199703 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**  
**PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAYATUN NUFUS, S.Sos

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FAISA MUKTI SETYANI, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi , Komunikasi Informasi dan Edukasi Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Keluarga Berencana,  
Advokasi, Komunikasi, Informasi dan  
Edukasi

Pihak Pertama  
Ketua Kelompok Kerja Advokasi,  
Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Faisa Mukti Setyani, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19680702 199803 1 004

Hayatun Nufus, S.Sos  
Penata  
NIP. 19760419 201101 2 002

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Seksi KIE Bidang Keluarga Berencana dan KIE

No	Sasaran Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sasaran Kegiatan</b>			
1.	Meningkatnya Akseptor KB MKJP	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	27.9%
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>			
1.	Terlaksananya fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	4 daerah
2.	Terlaksananya Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	4 daerah

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp 204.667.000	APBD

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Keluarga Berencana,  
Advokasi, Komunikasi Informasi dan  
Edukasi



Faisa Mukti Setyani, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19680702 199803 1 004

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Pertama,  
Analisis Kebijakan Ahli Muda  
Advokasi, Komunikasi,  
Informasi dan Edukasi



Hayatun Nufus, S.Sos  
Penata  
NIP. 19760419 201101 2 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**  
**PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wusani Setyaningsih, SE,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Ema Rachmawati, M.Hum

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

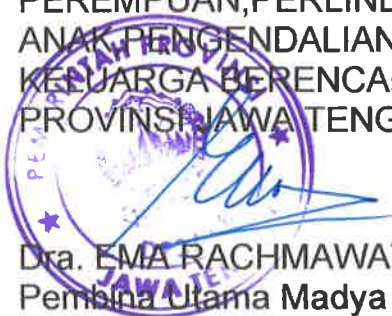
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN,PERLINDUNGAN  
ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH

Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001



Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG  
PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA SEJAHTERA

WUSANI SETYANINGSIH, SE,M.Si  
Pembina  
NIP. 19780919 200604 2 003

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan	Persentase kabupaten/kota yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah	75 %
2	Meningkatnya kampung keluarga berkualitas mandiri dan berkelanjutan	Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan	34 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengendalian Penduduk	Rp 160.000.000	APBD
2. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 177.353.000	APBD

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan Perlindungan  
Anak Pengendalian Penduduk  
Dan Keluarga Berencana  
Provinsi Jawa Tengah



Dra. Ema Rachmawati, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Wusani Setyaningsih, SE, M.Si  
Pembina  
NIP. 19780919 200604 2 003



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamulasih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaidukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vicencia Wahyu Novita Dewi, S.Sos,M.Si

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Penduduk

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Wusani Setyaningsih, SE,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Sejahtera

  
Wusani Setyaningsih, SE,M.Si  
Pembina  
NIP. 19780919 200604 2 003

Pihak Pertama  
Ketua Kelompok Kerja  
Pengendalian Penduduk

  
V.W Novita Dewi, S.Sos,M.Si  
Pembina  
NIP. 19771112 200801 1 016

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Seksi Pengendalian Penduduk Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>SASARAN KEGIATAN</b>			
1.	Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi penyusunan GDPK 5 Pilar	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK 5 pilar dalam pembangunan	28 kab / kota
2.	Tersedianya dokumen pemetaan Perkiraan Penduduk	Jumlah dokumen profil pembangunan kependudukan.	1 dok
<b>SASARAN SUB KEGIATAN</b>			
1	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	1 dok
2.	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	3 laporan
3.	Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand	2 dokumen

	Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	
4	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	2 daerah
5.	Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat provinsi (Termasuk diseminasi hasil penyusunan profil, penetapan parameter, dan evaluasi parameter Pengendalian Penduduk dan KB dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah)	Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dok

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas	Rp. 151.230.000,-	APBD
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Rp. 8.770.000,-	APBD

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

  
Wusani Setyaningsih, SE, M.Si  
Pembina  
NIP. 19780919 200604 2 003

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Pertama,  
Ketua Kelompok Kerja  
Pengendalian Penduduk

  
V.W. Novita Dewi, S.Sos, M.Si  
Pembina  
NIP. 19771112 200801 1 016



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**  
**PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR IDHA ARIYANTI, Skm.MM

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Keluarga Sejahtera

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WUSANI SETYANINGSIH, SE,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA  
SEJAHTERA

WUSANI SETYANINGSIH, SE,M.Si  
Pembina  
NIP. 19780919 200604 2 003

Semarang, 20 Januari 2026

Pihak Pertama,  
KETUA KELOMPOK KERJA  
KELUARGA SEJAHTERA

NUR IDHA ARIYANTI, Skm.MM  
Pembina  
NIP. 19830106 200604 2 005

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Seksi Keluarga Sejahtera Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sasaran Kegiatan</b>			
1.	Menurunnya jumlah perempuan melahirkan pertama kali di usia 15 - 19 tahun	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	16 per 1000 WUS 15 -19 tahun
2.	Meningkatnya kelompok UPPKA yang aktif	Persentase kelompok UPPKA yang aktif	95 %
2.1	Meningkatnya kelompok tribina (BKB, BKR dan BKL) yang aktif	Persentase kelompok tribina yang aktif	95 %
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>			
1.	Terpenuhinya PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	3 organisasi
2.	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	3 kelompok
3.	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	3 daerah
4.	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Program	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi	3 kab/kota

	Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat kabupaten/kota	Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	
5	Terlaksananya fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	2 laporan
6	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	2 organisasi

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 88.586.000	APBD
2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 88.767.000	APBD

Semarang, 20 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang  
Pengendalian Penduduk Dan  
Keluarga Sejahtera



Wusani Setyaningsih, SE,M.Si  
Pembina  
NIP. 19780919 200604 2 003

Pihak Pertama,  
Ketua Kelompok Kerja  
Keluarga Sejahtera



Nur Idha Ariyanti, Skm.MM  
Pembina  
NIP. 19830106 200604 2 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. YULI ARSIANTO, MM.

Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi  
Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Jawa Tengah

Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama,  
Kepala Unit Pelaksana Teknis  
Daerah

Drs. YULI ARSIANTO, MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680702 199803 1 004

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Unit Pelaksana Teknis Daerah

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	100%
2	Meningkatnya pelayanan korban kekerasan perempuan secara komprehensif	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 %
3	Meningkatnya pelayanan korban kekerasan anak secara komprehensif	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 628.552.000	APBD
2. Program Perlindungan Perempuan	Rp 136.040.000	APBD & DAK-N
3. Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 136.040.000	APBD & DAK-N

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Jawa Tengah



Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama,  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

Drs. YULI ARSIANTO, MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680702 199803 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIDHA SETYASIH, M.Psi

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. YULI ARSIANTO, MM

Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Unit Pelaksana Teknis  
Daerah Perlindungan Perempuan  
dan Anak

Drs. YULI ARSIANTO, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680702 199803 1 004

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

RIDHA SETYASIH, M.Psi  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19830110 201502 2 001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Unit Pelaksana Teknis Daerah

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sasaran Kegiatan</b>			
1.	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah di UPTD PPA	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun di UPTD PPA	1 dokumen
2.	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah di UPTD PPA	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan di UPTD PPA	90%
3.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di UPTD PPA	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di UPTD PPA	90%
4.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset di UPTD PPA	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan di UPTD PPA	3 unit
5.	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di UPTD PPA	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun di UPTD PPA	1 laporan
6.	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di UPTD PPA	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang	1 unit

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		dilakukan pemeliharaan di UPTD PPA	
7.	Terlayannya korban kekerasan perempuan yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	100%
8.	erlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	100%
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>			
1.	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 orang
2.	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang
3.	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang
4.	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan	2 orang

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
5.	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 orang
6.	Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7 orang
7.	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang
8.	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 orang
10.	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang
11.	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 orang
12.	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang
13.	Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat	7 orang

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
14.	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang
15.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen
16.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket
17.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket
18.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket
19.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
20.	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket
21.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 laporan

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
22.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan
23.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit
24.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
25.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit
26.	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 6.570.000 Rp 40.200.000	APBD APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 22.248.000	
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah		
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 2.500.000	APBD

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Unit kerja : Unit Pelaksana Teknis Daerah

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sasaran Kegiatan</b>			
1.	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah di UPTD PPA	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun di UPTD PPA	1 dokumen
2.	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah di UPTD PPA	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan di UPTD PPA	90%
3.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di UPTD PPA	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di UPTD PPA	90%
4.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset di UPTD PPA	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan di UPTD PPA	3 unit
5.	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di UPTD PPA	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun di UPTD PPA	1 laporan
6.	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di UPTD PPA	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang	1 unit

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		dilakukan pemeliharaan di UPTD PPA	
7.	Terlayannya korban kekerasan perempuan yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	100%
8.	erlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	100%
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>			
1.	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 orang
2.	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang
3.	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang
4.	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan	2 orang

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
5.	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 orang
6.	Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7 orang
7.	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang
8.	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 orang
10.	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang
11.	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 orang
12.	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang
13.	Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat	7 orang

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
14.	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 orang
15.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen
16.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket
17.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket
18.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket
19.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
20.	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket
21.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 laporan

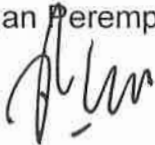
No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
22.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan
23.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit
24.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
25.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit
26.	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 6.570.000 Rp 40.200.000	APBD APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 22.248.000	
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah		
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 2.500.000	APBD

- |  |    |             |               |
|--|----|-------------|---------------|
| 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Rp | 520.925.000 | APBD          |
|  | Rp | 36.109.000  | APBD          |
| 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Rp | 136.040.000 | APBD & DAK NF |
| 7. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rp | 136.040.000 | APBD & DAK NF |
| 8. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi                                     |    |             |               |

Semarang, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Perlindungan Perempuan dan Anak



Drs. YULI ARSIANTO, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730120 199803 2 004

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Unit Pelaksana Teknis Daerah



RIDHA SETYASIH, M.Psi  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19830110 201502 2 001